

## Pemkab Bogor Jaga Kelestarian Wilayah Hulu Demi Tunjang Waduk Cibeet

**CIBINONG (IM)**- Pembangunan Waduk Cibeet di Kabupaten Bogor menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Dalam rangka menjaga dan mengamankan aset negara ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan pelestarian wilayah hulu Waduk Cibeet, yakni Air terjun (Curug) Cibeet.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menjelaskan pembangunan Waduk Cibeet menjadi Program Strategis Nasional, agar Waduk Cibeet itu lestari, maka wilayah hulu wilayah harus lestari juga, antara lain di Curug Cibeet. “Pemkab Bogor bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama melindungi Curug Cibeet agar tetap menjadi ruang terbuka

hijau, tapi tetap ada nilai manfaatnya,” kata Burhanudin, kemarin.

Ia menyebutkan, sebelumnya Bupati Bogor menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada bulan Juni tahun 2021.

Untuk diketahui, Waduk Cibeet akan dibangun dengan lahan seluas 1.700,26 hektare di delapan desa yang ada di dua kecamatan, yaitu Tanjungsari dan Cariu. Waduk tersebut diyakini dapat mereduksi banjir di kawasan, untuk irigasi, kebutuhan air baku, artinya bisa digunakan untuk kebutuhan air baku PDAM, bisa juga untuk PLTA dan tentunya untuk kegiatan pariwisata. ● **gio**

KORBAN MAFIA TANAH REDISTRIBUSI DARI JOKOWI

## Puluhan Warga Caringin Mengadu ke Ketua DPRD Kabupaten Bogor

**CIBINONG (IM)** - Puluhan warga Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, penerima sertifikat lahan redistribusi dari Presiden Jokowi mengadu ke DPRD Kabupaten Bogor karena menjadi korban mafia tanah. Pada saat Sertifikat Hak Milik atas lahan itu terbit, mereka justru malah diusir dan disuruh mengosongkan lahan taninya mereka.

Mereka mendatangi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto di Cibinong agar lahan mereka dikembalikan. “Kami minta keadilan, bapak sebagai ketua dewan yang mewakili kami rakyat kecil, kami minta lahan kami yang diberikan oleh pemerintah kembali.

Pria 52 tahun itu mengatakan masyarakat Pancawati memperoleh lahan pertanian itu dari program redistribusi tanah Presiden Joko Widodo alias Jokowi sejak tahun 2015-2016. Tapi sertifikat tanah itu tidak pernah sampai ke tangan mereka. Ujung menyebut pemerintah Desa Pancawati seakan-akan menyembunyikan sertifikat itu.

Kini mereka didatangi pengusaha dan bahkan warga negara asing yang datang bersama preman untuk mengusir warga dengan dalih telah membeli lahan itu.

“Dulu itu kami dikasih

tahu ketika lahan dikasih dan sertifikat terbit, kami dilarang memperjualbelikan lahan selama 10 tahun tiga kali ke depan. Ini ujung-ujug datang orang yang kami gak kenal, mereka usir kami dengan alasan mereka beli lahan kami. Siapa yang jual, kami tidak pernah jual lahan itu ke siapa pun. Melalui forum ini, kami ingin pak Ketua Dewan sampaikan keluhan kami ke Presiden,” ucap Ujung.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan aduan warga Pancawati yang kehilangan sertifikat tanah dari Jokowi itu. Dia akan segera berkoordinasi kepada Pemkab Bogor, Polres, Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

Rudy menduga, dalam kasus ini warga ditipu dan dibodohi oleh pemerintah desanya yang berkongkalikong dengan mafia tanah.

“Wajar mereka marah saya, karena itu hak mereka. Saya pun mengerti kenapa mereka marah, karena mereka yang garap sudah lama, turun SHM, tapi dijual sama oknum.

Ini akan saya teruskan dan ini harus segera jelas kedudukan hukumnya, yang berhak tetap memiliki haknya dan oknumnya ya proses hukum,” kata Rudy. ● **gio**

## Pemkab Bogor Terima Tim Verifikasi Kabupaten Layak Anak

**BOGOR (IM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerima tim verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.

Mereka melakukan Verifikasi Lapangan (VL) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bogor Tahun 2022, yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Rabu (29/6).

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, melalui kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak ini menjadi motivasi bagi Pemkab Bogor dalam berupaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bogor.

“Mudah-mudahan dengan verifikasi lapangan ini bisa menjadi sarana bahan kritik, saran dan masukan yang membangun, sehingga kita bisa memenuhi yang kurang dan mempertahankan yang sudah baik, serta kita bisa maksimal dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada seluruh anak di Kabupaten Bogor,” ungkap Iwan Setiawan.

Untuk diketahui, menurut data BPS Tahun 2021, di Kabupaten Bogor terdapat 1.848.546 anak berusia 0-19 tahun. Beragam kebijakan strategis dan berkelanjutan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, dengan mengintegrasikan komitmen stakeholder, sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan dunia pendidikan.

“Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan gambaran akan perkembangan signifikan dan konsistensi Pemkab Bogor dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Terima kasih dan selamat melakukan verifikasi, kami sangat terbuka menerima bimbingan dan ara-

han agar kami bisa lebih baik dalam melaksanakan pemenuhan hak anak ini,” terang Plt. Bupati Bogor.

Selanjutnya, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA RI, Elvi Hendrani menjelaskan bahwa melalui verifikasi lapangan ini pihaknya akan memverifikasi mulai dari dokumen hingga kondisi dan implementasi di lapangan terkait penerapan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bogor, terutama lima klaster pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap anak.

“Secara garis besar kami akan melihat langsung ke lapangan, klaster 1 bagaimana, klaster 2 seperti apa, untuk melihat seperti apa, dari sisi kebijakan, implementasi dan pengawasan di lapangan. Lima klaster ini harus dimulai dari desa, kelurahan, dan kecamatan karena itu menjadi pondasi yang kuat untuk menjadikan Kabupaten Bogor Layak Anak,” jelas Elvi.

Di tempat yang sama, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menambahkan bahwa sebelum melakukan kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten/Kota ini, pihaknya telah melakukan pendampingan melalui kegiatan Bimbingan Teknis kepada 27 Kota/Kabupaten se-Jawa Barat.

“Semoga verifikasi lapangan ini bisa berjalan dengan baik, serta dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Bogor, Provinsi Jabar dan Pusat dalam memenuhi hak-hak anak. Kami juga berharap Kabupaten Bogor bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih,” imbuh Kadis DP3AKB Jabar.

Turut hadir di kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 yakni, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, para Kepala Perangkat Daerah, Camat Cibinong, dan para kepala UPT PPA. ● **gio**

# 8 | Nusantara



GANJAR PRANOWO HADIRI HARGANAS 2022

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kedua kiri) menyapa warga saat menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2022 tingkat Jawa Tengah di Desa Watukumpul, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (29/6). Pada peringatan Harganas yang mengusung tema “Ayo Cegah Stunting agar Keluarga Bebas Stunting” tersebut, Ganjar Pranowo mengajak semua elemen masyarakat bersama-sama pemerintah dan TNI-Polri serius menangani stunting demi generasi mendatang yang sehat dan cerdas.

## Warga Kota Bandung Wajib Pakai MyPertamina Beli BBM Mulai 1 Juli

Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang akan mewajibkan penggunaan MyPertamina, bersama Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Sukabumi untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan Solar mulai 1 Juli 2022.

**BANDUNG (IM)** - Empat daerah di Jawa Barat akan diwajibkan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan Solar mulai 1 Juli 2022 mendatang.

Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang akan mewajibkan penggunaan MyPertamina, bersama Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Sukabumi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Elly Wasilah mengatakan, pemilihan wilayah ini merupakan keputusan langsung dari pemerintah pusat. Meski begitu, Kota Bandung, kata dia diyakini siap untuk menjadi salah satu wilayah percontohan penerapan MyPertamina.

“Iya, di Jabar ada empat wilayah yang ditentukan sebagai pilot project, salah satunya

Kota Bandung,” kata Elly saat dihubungi, Rabu (29/6).

Meski begitu, Elly belum dapat memastikan penggunaan kendaraan apa saja yang akan diwajibkan mendaftar di MyPertamina. Menurutnya, berdasarkan informasi saat ini hanya pengendara kendaraan roda empat saja yang akan diwajibkan menggunakan MyPertamina untuk membeli Pertalite maupun Solar.

“Belum ada kepastian, karena ada informasi hanya untuk kendaraan roda empat. Ini yang ingin saya pastikan lagi,” ujarnya.

Adapun SPBU mana yang akan menerapkan peraturan baru ini, kata Elly, juga belum dapat dipastikan. Namun dia memperkirakan bahwa aturan ini akan diterapkan di 81 SPBU, dari total 94 SPBU di seluruh Kota Bandung.

“Yang jelas mungkin seluruh SPBU yang bekerjasama dengan Pertamina akan menerapkan ini (MyPertamina), tapi 13 sisanya saya belum tau, makanya saya ingin pastikan lagi apakah akan menerapkan aplikasi MyPertamina juga atau tidak,” ujarnya.

“Tapi yang jelas kita (Kota Bandung) harus siap, karena kita ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai lokasi percontohan dan akan diterapkan mulai 1 Juli mendatang,” pengkasnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyatakan aplikasi MyPertamina akan menjadi syarat untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/6), mengatakan, pihaknya berinisiatif dan berinovasi untuk melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna berhak yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina mulai 1

Juli 2022.

Pertamina menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui laman tersebut untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem MyPertamina akan membantu perseroan dalam melakukan pencocokan data pengguna yang akan membeli BBM bersubsidi.

Alfian meminta masyarakat untuk tidak khawatir apabila tidak memiliki aplikasi MyPertamina karena pendaftaran dilakukan semua di laman MyPertamina <https://subsidiempat.mypertamina.id/>. Menurutnya, pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan.

“Pengguna terdaftar akan mendapatkan kode QR khusus yang menunjukkan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Solar,” jelas Alfian. ● **pra**

## BPTJ Kembangkan Layanan Bus Berbasis BTS di Bekasi-Tangerang 2023-2024

**JAKARTA (IM)** - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengembangkan layanan bus berbasis Buy The Service (BTS/Pembelian Layanan) di wilayah Kota Bekasi dan Kota Tangerang pada 2023-2024.

“Kegiatan ini merupakan usulan pemerintah kota setempat,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPTJ, Umar Aris dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (29/6).

Umar menyebut setidaknya ada empat alternatif rute BTS di Bekasi. Yaitu Terminal Bekasi-Kota Harapan Indah; Pasar Sumber Arta-Wisma Asri; Terminal Bekasi-Plaza Pondok Gede; dan Sumarecon-Pasar Alam Vida. Sementara alternatif rute di Kota Tangerang yakni Tangcity-Bandara Soekarno Hatta. Lebih lanjut, selain layanan bus berbasis BTS di dua kota penyangga Jakarta

itu, BPTJ juga memasukkan pembangunan integrasi Stasiun Bogor dalam rencana pengembangan konektivitas di Jabodetabek pada 2024.

Pembangunan integrasi Stasiun Bogor meliputi penerapan fasilitas pejalan kaki, pemasangan utilitas, dan peningkatan integrasi layanan angkutan umum (BTS dan angkot) melalui halte di kawasan Stasiun Bogor serta keterhubungan akses dengan Stasiun Paledang. “Ketiga, pembangunan Stasiun Gunung Putri pada 2024,” ujarnya.

Umar menjelaskan reaktivasi Stasiun Gunung Putri dilakukan melalui pembangunan gedung stasiun dan kawasan sekitar stasiun. Reaktivasi Stasiun Gunung Putri juga merupakan bagian dari peningkatan layanan perkeretaapian di lintas Citayam-Nambo. Selanjutnya, rencana keempat, yaitu pembangunan jalur sepeda di Kota dan Kabupaten Bekasi sepanjang 20,6 km pada 2023 serta

di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sepanjang 25,9 km pada 2024.

“Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan hasil koordinasi usulan dari pemerintah daerah,” tegas Umar.

Sebelumnya, BPTJ menyebut ada lima proyek strategis yang termasuk dalam prioritas nasional untuk dilaksanakan pada 2023 dengan anggaran sebesar Rp 105 miliar.

Di antaranya, peningkatan bangunan operasional Stasiun Pondok Rajeg, pembangunan fasilitas integrasi perpindahan moda di kawasan Stasiun Bogor, subsidi angkutan penumpang (buy the service) di Kota Bogor beserta pendampingan manajemen proyek, area traffic control system (ATCS) terpadu Jabodetabek, dan fasilitas sistem keselamatan dan transportasi perkotaan di Jawa Barat dan Banten. Ada pun jumlah pagu indikatif BPTJ tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 259 miliar. ● **pp**



KAMPUNG WISATA TEKSTIL BANDUNG

Pedagang merapikan produk tekstil yang dijual di Kampung Wisata Kreatif Tekstil Cigondewah, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/6). Pemerintah Kota Bandung mereaktivasi kampung wisata kreatif yang khusus memasarkan berbagai kain dan bahan tekstil tersebut guna meningkatkan serta memulihkan geliat ekonomi, pariwisata dan budaya di kota Bandung.

## Saat Ahok, Bima Arya, dan Airin Berkelakar soal Pilkada DKI

**JAKARTA (IM)** - Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Wali Kota Bogor, Bima Arya dan mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany berpeluang maju di Pilkada DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Ahok saat satu panggung bersama Bima Arya dan Airin dalam diskusi Ikatan Alumni Universitas Parahyangan (IKA UNPAR) di Jakarta, Selasa (28/6) malam.

Dalam kesempatan tersebut Ahok dan Bima Arya hadir sebagai narasumber, sementara Airin didaulat sebagai moderator.

Ada momen menarik ketika Ahok berkelakar menyebut dirinya diapit oleh dua orang yang akan maju Pilgub Jakarta 2024 mendatang, yakni Bima Arya dan Airin Rachmi Diany.

“Gawat nih, dua-duanya mau maju DKI, depan gua,” ujar Ahok, disambut riuh peserta yang hadir.

Menyambut ucapan Ahok tersebut, Bima Arya kemudian menoleh ke Airin sembari berkata, “Mau pasangan di Jakarta, kita?”

Hadirin bertepuk tangan. Sementara Airin hanya tersenyum.

“Ini (Airin) sudah dipinang partai lain. Susah ini,” timpal Bima lagi.

Perbincangan kemudian dilanjutkan kembali. Sebelum memasuki sesi akhir, Airin bertanya kepada Bima Arya seputar langkah Bima Arya ke depan usai menjabat sebagai Wali Kota Bogor.

“Apa yang kang Bima akan lakukan ke depan? Walaupun tadi sudah bisik-bisik, siapa tahu ada pencapaian lainnya.

Atau pengen jadi kayak Pak Ahok jadi komisaris? Atau apa yang ingin dilakukan Kang Bima di masa yang akan datang?” tanya Airin.

Bima Arya menjawab jabatannya sebagai Wali Kota Bogor akan berakhir pada 31 Desember 2023. Ia mengaku akan fokus menyelesaikan berbagai persoalan di kota hujan. Salah satunya penataan transportasi.

“Nomor satu adalah urusan angkot. Target saya, hari terakhir saya ngantor di Balai kota, angkot di pusat kota sudah tidak ada. Ada cara-caranya agak detail kalau dijelaskan sekarang,” jelasnya.

Kedua, lanjut Bima, kawasan Suryakencana sedang ditata untuk menjadi salah satu Chinatown terbaik di Tanah Air.

“Ketiga, saya harus menyiapkan pengganti. Seperti Pak Jokowi menyiapkan Pak Ahok ketika itu. Tidak mungkin yang saya kerjakan 10 tahun itu hilang saja. Kita banyak belajar bagaimana teman-teman wali kota yang oke, digantikan bukan orang yang oke. Kemudian rontok achievement-nya. Tugas saya membangun pagar pengaman supaya siapa pun yang terpilih sustain semuanya,” bebernya.

“Urusan setelah 31 Desember ke mana, saya kira akan sangat tergantung pada 14 Februari 2024 nanti. Hasil pileg dan pilpres pasti menentukan yang lain-lain, baik menentukan Pilgub DKI, Pilgub Jabar dan lain-lain.

Sekarang perspektif saya fight menyelesaikan tugas, meninggalkan legacy yang kuat hingga nanti 31 Desember 2022,” kata Bima. ● **pra**